DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun 2020	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap	27
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	42
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	95
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	95
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda Kabupaten Cilacap	95
3.3. Inovasi Setda Kabupaten Cilacap.....	98
3.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	98
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP	100
BAB V PENUTUP	223

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Cilacap	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap	24
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021	31
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021..	97
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Setda Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	101
Tabel 4.2 Hasil mapping Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 90 tahun 2019	115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rencana Kerja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud.

Cilacap, Agustus 2020

Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap,

Drs. FARID MA'RUF, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620322 198607 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 125 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang ada dan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja bagi Instansi Pemerintah dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar mampu menjawab berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Instansi Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Manfaat penyusunan rencana kerja antara lain : 1) untuk merencanakan suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan dan kepentingan dari semua stakeholder; 2) untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3) berorientasi kepada masa depan atau berkelanjutan ; 4) fleksibel (menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada).

Dengan demikian untuk memperoleh hasil fisik yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang matang baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154).

Rancangan Akhir Renja Setda Kabupaten Cilacap yang selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Setda Kabupaten Cilacap setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap. Renja tersebut sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan SKPD di tahun mendatang.

1.2. **Landasan Hukum**

Sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja –Perangkat Daerah (Renja - PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 84); ;
- 25) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 94);
- 26) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 101);

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Setda Tahun 2021 adalah untuk :

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Setda Kabupaten Cilacap;
3. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2021.
6. Bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Setda Kabupaten Cilacap, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Setda Kabupaten Cilacap dengan dokumen

RKPD, Renstra Setda Kabupaten Cilacap, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Cilacap, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Setda Kabupaten Cilacap, kewenangan Setda Kabupaten Cilacap, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun lalu dan Capaian Renstra Setda Tahun 2017 – 2022.

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Setda Tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Setda Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berisikan uraian tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta mengenai isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

- 2.4. Review Terhadap RKPD, berisikan telaah RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda Kabupaten Cilacap
Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Setda Kabupaten Cilacap.
- 3.3. Inovasi Setda Kabupaten Cilacap
Berisikan inovasi yang dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada Setda Kabupaten Cilacap.
- 3.4. Program dan Kegiatan Setda Kabupaten Cilacap
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dan Perkiraan capaian tahun 2020.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019, masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Hasil pelaksanaan Renja 2019 jumlah anggaran sebesar Rp.34.031.502.153,- dengan rincian per Bagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan jumlah anggaran Rp.769.911.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.701.582.800,- (91,13 %) dan realisasi fisik 100%.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan jumlah anggaran Rp.3.753.313.903,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.525.052.200 ,- (93,92%) dan realisasi fisik 100%.
3. Bagian Hukum dengan jumlah anggaran Rp. 1.000.084.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 940.499.850 ,- (94,04%) dan realisasi fisik 100%.
4. Bagian Perekonomian jumlah anggaran Rp.1.475.105.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.220.927.300,- (82,77%) dan realisasi fisik 100 %.
5. Bagian Administrasi Pembangunan jumlah anggaran Rp.727.798.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.651.176.000,- (89,47%) dan realisasi fisik 100%.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa jumlah anggaran Rp.2.593.143.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2,352,358,500.00,- (90,91%) dan realisasi fisik 100%.
7. Bagian Humas dan Protokol jumlah anggaran Rp.1.530.142.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.287.654.000,- (84,15%) dan realisasi fisik 100%.
8. Bagian Organisasi jumlah anggaran Rp. 1.291.595.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.131.498.400,- (87,60%) dan realisasi fisik 100%.

9. Bagian Umum jumlah anggaran Rp. 15.510.853.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.524.770.884,- (87,20%) dan realisasi fisik 100%.
10. Bagian Keuangan dan Aset jumlah anggaran Rp. 5.379.554.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,867,993,325.00,- (90,49%) dan realisasi fisik 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Setda secara umum dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setda s/d Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Setda Tahun 2019 (tabel 2.1) sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada hakekatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap setiap tahun adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Setda baik dalam lingkup internal (SKPD) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-pihak terkait). Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan sesuai rencana strategis (Renstra) Setda Kabupaten Cilacap, dapat dikemukakan gambaran pencapaian kinerja pelayanan Setda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah (tabel 2.2) sebagai berikut :

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari seluruh fungsi dan urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit-unit kerja (Bagian). Isu strategis juga merangkum berbagai potensi yang secara strategis potensial untuk menjadi pokok-pokok strategi pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka perwujudan visi dan misi Sekretariat Daerah. Permasalahan dan potensi tersebut dapat berupa faktor yang berasal dari dalam lingkungan Sekretariat Daerah (internal) maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Perda No. 23 Tahun 2008), permasalahan pokok yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap antara lain meliputi :

1. Tingginya angka kemiskinan.
2. Belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat.
3. Profesionalisme Aparatur belum sesuai kompetensinya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam.
5. Kondisi prasarana infrastruktur yang belum memadai.
6. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan yang menyebabkan rawan bencana.
7. Lambannya upaya penegakan hukum.

Permasalahan/tantangan tersebut di atas, sejalan dengan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, yang meliputi 9 (sembilan) permasalahan pokok yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (Rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk). Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, gizi stunting, HIV AIDS, TB, dan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan lanjutan,

Tingginya kasus kekerasan gender disebabkan oleh masih kurangnya pendapatan perempuan, rata-rata sekolah pada perempuan yang masih relatif kurang.

Pengendalian penduduk masih menjadi permasalahan dilihat dari tingginya *unmetneed*, kesertaan KB aktif pada metode MKJP.

2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya nilai akuntabilitas, masih ditemukan ASN yang tidak disiplin, masih terjadinya temuan inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah. Masih terjadinya usaha mikro yang belum dibina, koperasi tidak sehat masih tinggi, belum optimalnya pengelolaan inovasi pada ekonomi kreatif.
4. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Pengangguran, terutama terkait dengan :
 - 1) Masih tingginya angka pengangguran dan kesesuaian ketrampilan pencari kerja (Pencaker) tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dalam bidang industri.
 - 1) Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2016 masih lebih besar daripada rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
5. Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah. Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur Pendapatan dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan masih bergantung pada dana perimbangan (DAU dan DAK).
6. Masih ditemukannya kasus penyakit masyarakat. Angka kriminilitas masih ditemukan, kasus pencurian, penggunaan minuman keras dan narkoba.
7. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, sumberdaya air, transportasi, perumahan pemukiman dan ruang terbuka hijau).
8. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Masih ditemukannya pencemaran air, udara, dan lahan kritis. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan Metode 3 R (*reduse, reuse, dan recycle*)

9. Belum optimalnya pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan. Kabupaten Cilacap memiliki bencana yang cukup lengkap, sampai dengan tahun 2016 telah disusun rencana penanggulangan bencana dan mitigasi bencana (masih ditemukannya bangunan-bangunan di daerah rawan bencana).

Sedangkan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah urusan penunjang yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
3. Belum optimalnya pelayanan publik.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 diarahkan untuk bersinergi dalam mengatasi permasalahan pokok yang ada guna mendukung terwujudnya visi – misi Kabupaten Cilacap.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 150 Tahun 2018. Terkait dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021.

Berpijak dari kondisi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 perlu konsistensi agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dan sinergis dengan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya untuk membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, selaras, terpadu dan berkesinambungan antar seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD dan RKPD/ Renja SKPD setiap tahunnya.

Secara lengkap hasil review terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka untuk mengakomodir usulan / permohonan dari masyarakat telah direncanakan dalam alokasi anggaran belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial. Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diantaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana peribadatan, kepemudaan dan keolahragaan, dan lain-lain.

Beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Belanja hibah kepada badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial ;
2. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

Terdiri dari :

- a. Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp.13.242.000.000,- dari jumlah usulan sebanyak 487 kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan
- b. Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp.23.543.000.000,- dari jumlah usulan sebanyak 671 kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Setda Kabupaten Cilacap merupakan unsur staf yang membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap melalui unit-unit kerja / bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Bupati Cilacap yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang

memiliki tujuan : **“Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**

Secara operasional, tujuan-tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan serta harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah

1. Meningkatkan fungsi koordinasi.
2. Melibatkan partisipasi *stake holders*.

b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah :

1. Meningkatkan pengendalian kegiatan.
2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan.

c. Meningkatnya kinerja pelayanan Setda

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Setda.

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bagian di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap didasarkan pada tujuan dan sasaran tersebut di atas dengan memperhatikan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Tujuan dan Sasaran PD pada tahun rencana ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2018 (n-2)	Capaian Tahun 2019 (n-1)	Target Tahun 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai EKPPD			3,1270 (sangat tinggi)	na	2,7
			Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundangan-undangan	90	na	95
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah	Nilai AKIP Setda	84,65	na	60
			Meningkatnya kinerja pelayanan Setda	Nilai SKM Setda	78,96	na	80

3.3 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi kegiatan 2021 di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap antara lain :

1. Sisukma yaitu Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan perintah sebagai penyedia layanan belum dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik.
2. E-SAKIP terintegrasi dg e-planning dan e-budgeting yaitu Melalui e-Sakip Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet maupun smartphone. Dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai target yang ditetapkan.
3. Verifikasi RKA-DPA online yaitu Untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi RKA-DPA dilaksanakan secara on line melalui aplikasi SIGAP, sehingga dapat dimonitor secara langsung oleh Pimpinan OPD mana saja yang sudah diapprove oleh Tim Koreksi dan mana saja yang masih perlu perbaikan. Apabila belum di approve tidak dapat diproses lebih lanjut.

3.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan

pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022;

- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai unsur staf yang membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 15 program yang terdiri 5 program pada setiap Perangkat Daerah dan 10 program pembangunan;
- 2) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 95 kegiatan pembangunan.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 secara total sebesar Rp.33.114.635.910 ,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP

Program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebanyak 95 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.33.114.635.910 ,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap dan Rp.100.000.000,- bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Program dan kegiatan Rancangan Renja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 4.1.

4.2 Hasil mapping Permendagri 16 tahun 2006 dan Permendagri 90 Tahun 2019

Program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap di mapping dengan Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana tabel 4.2 dibawah ini

BAB V
PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah, dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Produk-produk perencanaan yang dihasilkan untuk tahun 2021 ini senantiasa mengacu pada hasil koordinasi perencanaan masing-masing bagian secara aspiratif, sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi yang sinergis dan pada akhirnya pencapaian hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 selain menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Setda dan sarana untuk melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Cilacap,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap

Drs. FARID MA'RUF, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620322 198607 1 002

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI